



STRATEGI GURU PPKN DALAM MEMANFAATKAN INTERNET SEBAGAI SUMBER BELAJAR UNTUK MENGUATKAN CIVIC LITERACY PESERTA DIDIK AGAR TERHINDAR DARI INFORMASI HOAX DI SMAN 8 SELUMA

Faisen Purdiansa¹, Zulyan²

^{1,2}Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat: Jalan Bali, Kota Bengkulu, 38119

paizenplayers2001@gmail.com, zulyan@umb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Strategi guru PPKn dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar untuk menguatkan civic literacy peserta didik agar terhindar dari informasi hoax; 2) Dampak dari strategi guru PPKn dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar untuk menguatkan civic literacy peserta didik agar terhindar dari informasi hoax; dan 3) Faktor pendukung dan penghambat dari strategi guru PPKn dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar untuk menguatkan civic literacy peserta didik agar terhindar dari informasi hoax

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi dokumen, dan angket. Pengujian validitas data menggunakan model analisis triangulasi data dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Guru PPKn merancang Modul ajar yang mendukung penguatan civic literacy peserta didik, mengimplementasikan modul ajar yang dirancang ke dalam proses pembelajaran serta memasukkan penilaian dengan memasukkan penilaian sikap responsif dan proaktif, penilaian pengetahuan dengan soal tertulis dan penilaian keterampilan dengan observasi, 2) Meningkatnya civic literacy peserta didik dilihat ketika diskusi kelompok mengenai isu-isu politik yang sedang berkembang peserta didik dapat aktif mengeluarkan pendapat dan berfikir kritis sehingga diperoleh informasi yang benar dan terhindar dari informasi hoax, 3) Faktor pendukung guru dalam penguatan civic literacy peserta didik meliputi: a) berasal dari sarana dan prasarana sekolah yaitu sekolah menyediakan akses internet berupa wifi; b) berasal dari guru yaitu keinginan untuk menguatkan civic literacy peserta didik dengan memanfaatkan internet, pada pelaksanaan pembelajaran, dan pada evaluasi pembelajaran; c) berasal dari peserta didik yaitu keingintahuan peserta didik yang kuat untuk mengetahui informasi baru. Faktor penghambat meliputi: a) berasal dari sekolah yaitu: lemahnya sinyal wifi sekolah; b) berasal dari guru yaitu guru kesulitan mengintegrasikan rancangan modul ajar dan materi yang berperspektif penguatan civic literacy dalam setiap kompetensi dasar; dan c) berasal dari peserta didik yaitu tingkat kemampuan peserta didik yang berbeda-beda.

Kata Kunci: strategi, civic literacy, informasi hoax

Abstract

This research aims to find out: 1) Civics teachers strategies in utilising the internet as a learning resource to strengthen students civic literacy to avoid hoax information; 2) The impact of the Civics teacher's strategy in utilising the internet as a learning resource to strengthen students civic literacy to avoid hoax information; and 3) The supporting and inhibiting factors of the Civics teacher's strategy in utilising the internet as a learning resource to strengthen students civic literacy to avoid hoax information.

This research uses a qualitative research approach. The type of research used is descriptive qualitative. The sampling technique used was purposive sampling. Data collection used interviews, observations,



document studies, and questionnaires. Data validity testing used data triangulation and method triangulation analysis models. Data analysis used an interactive analysis model.

The results showed that: 1) Civics teachers design teaching modules that support the strengthening of students' civic literacy, implement the designed teaching modules into the learning process and include assessment by including responsive and proactive attitude assessment, knowledge assessment with written questions and skills assessment by observation, 2) Increased civic literacy of students can be seen when group discussions on emerging political issues students can actively express opinions and think critically so that correct information is obtained and avoid hoax information, 3) Supporting factors for teachers in strengthening students' civic literacy include: a) coming from school facilities and infrastructure, namely schools providing internet access in the form of wifi; b) coming from teachers, namely the desire to strengthen students' civic literacy by utilising the internet, in the implementation of learning, and in learning evaluation; c) coming from students, namely strong curiosity of students to find out new information. The inhibiting factors include: a) coming from the school, namely: weak school wifi signal; b) coming from teachers, namely teachers have difficulty integrating the design of teaching modules and materials with a perspective of strengthening civic literacy in each basic competency; and c) coming from students, namely the different levels of ability of students.

Keywords: strategy, civic literacy, hoax information

1. PENDAHULUAN

Pendidikan bagi suatu negara menjadi aset yang sangat penting khususnya dalam hal pembangunan sumber daya manusianya, karena pendidikan merupakan sarana dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan yang akan membentuk kualitas sumber daya manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Salah satu mata pelajaran wajib mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yaitu mata pelajaran PPKn. Secara umum, PPKn memiliki fungsi pokok untuk mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab warga negara, dan mendorong partisipasi warga negara (Winarno, 2013: 19). Pendidikan kewarganegaraan memiliki kesamaan fungsi dan tujuan dengan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi warga negara agar menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dan mendorong partisipasi warga negara yang pada



akhirnya menjadi warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizenship). Untuk mewujudkan smart and good citizenship tersebut, salah satunya yaitu diperlukan penguatan kemelekwacanaan warga negara (civic literacy) untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam proses politik dengan didasari pengetahuan politik yang baik.

Menurut Suryadi, civic literacy (kemelekwacanaan kewarganegaraan) adalah “ pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik dan kenegaraan” . Dalam khasanah ilmu kewarganegaraan, civic literacy ditempatkan sebagai elemen dasar kebajikan politik warga negara (political virtue of citizenship), di dalam civic literacy tersirat penguasaan bentuk pengetahuan politik warga negara pada khususnya dan akan dimanifestasikan dalam aktivitas kewarganegaraan (Suryadi, 2010: 29- 30).

Sedangkan Milner (2002: 1) di dalam bukunya yang berjudul Civic Literacy: How Informed Citizens Make Democracy Work menjelaskan “ two aspects of citizenship as measurable dimensions of civic literacy: ability manifesting itself in the form of political knowledge, and willingness in the form of political participation” . Dalam kutipan tersebut Milner menjelaskan bahwa civic literacy diukur dari dua dimensi meliputi kemampuan seseorang mewujudkan dirinya dalam bentuk pengetahuan politik dan kemauan dalam bentuk partisipasi politik. Pendapat Milner secara tidak langsung menjelaskan bahwa pengetahuan politik seseorang menjadi faktor penting terhadap sikap dan perilakunya dalam berpartisipasi di dunia politik.

Dari kedua pendapat di atas, kemelekwacanaan warga negara menjadi penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik, karena keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik harus didasari pengetahuan politik yang baik. Selain itu, civic literacy menjadi salah satu bentuk usaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa (Raharjo, 2017: 178). Civic literacy diperlukan sebagai usaha untuk membentuk pola pikir masyarakat agar menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk ikut serta berpartisipasi dan mengatasi permasalahan yang ada.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, arus globalisasi yang pesat khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (IPTEK) membawa pengaruh yang sangat besar. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan setiap orang untuk berinteraksi dengan orang lain dimanapun dan



kapanpun. Selain itu, kemajuan teknologi informasi juga memudahkan setiap orang untuk memperoleh data ataupun informasi dibelahan dunia manapun, sehingga dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi struktur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu internet. Internet menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan hasil survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2017 jumlah pengguna internet di Indonesia 143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia 262 juta jiwa (<https://apjii.or.id>). Angka tersebut menunjukkan bahwa 54,68% penduduk Indonesia memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Presentase pemanfaatan internet di Indonesia yang cukup tinggi karena berbagai layanannya memudahkan setiap orang untuk berinteraksi dan memperoleh informasi. Kemudahan akses informasi di internet serta banyaknya layanan media sosial seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp dan path sering sekali memunculkan informasi yang tidak jelas kebenaran dan tersebar dengan cepat. Penyebaran informasi yang cepat melalui media massa, padahal informasi tersebut tidak jelas kebenaran dan sumbernya yang biasa dikenal berita bohong atau hoax, dapat mempengaruhi pengetahuan setiap warga negara dalam menanggapi berbagai persoalan atau fenomena yang terjadi dimasyarakat.

Menurut Ferdian (2016: 236) berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*). Di Indonesia sendiri penyebaran berita hoax sangat banyak. Hal tersebut didukung dengan data dari Kominfo bahwa pada tahun 2017 terdapat 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia (https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media). Berita bohong (hoax) sangat berbahaya mengingat kondisi bangsa Indonesia yang beranekaragam karena dapat menyebabkan perselisihan dan perpecahan. Salah satu penyebaran informasi hoax yang menyita perhatian masyarakat yaitu kasus hoax Ratna Sarumpaet. Dari berita hoax Ratna Sarumpaet ini banyak masyarakat yang mempercayainya. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya civic literacy masyarakat Indonesia, hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa isu-isu yang berkembang dimasyarakat terutama melalui media sosial dan perkembangan teknologi informasi sehingga banyak tersebar berita hoax,



hate spech (ujaran- kebencian) yang kebenarannya masih diragukan, terhadap isu-isu tersebut tidak sedikit masyarakat yang langsung percaya dengan isu– isu yang tidak benar tersebut karena rendahnya civic literacy (Erna, 2018: 120).

. Selain itu, ketika proses pembelajaran di kelas dari 32 peserta didik terdapat 13 atau 40.63% peserta didik belum dapat membedakan informasi yang jelas kebenaran dan sumbernya. Peserta didik mencari berita atau informasi dan mempercayainya tanpa meneliti kebenaran dan sumber datanya. Peserta didik mencari informasi seperti artikel berita politik pada blog-blog yang tidak diketahui kevalidan datanya. Peserta didik hanya menyalin tanpa memperhatikan sumbernya. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya civic literacy yang dimiliki peserta didik. Indikator lain dari rendahnya civic literacy adalah peserta didik yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran, hal ini ditunjukkan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung dengan metode tanya jawab dan diskusi terkait permasalahan politik, peserta didik belum mampu berpartisipasi aktif dan memberikan argumentasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dipaparkan. Untuk dapat mengutarakan argumentasinya peserta didik memerlukan dorongan dari guru. Hanya 1 atau 2 peserta didik yang dapat aktif memberikan argumentasinya. Sebagian besar peserta didik belum dapat memberikan argumentasinya, karena sebagian besar peserta didik hanya memahami konsep yang diberikan oleh guru.

2. METODE PENELITIAN

Merujuk pada permasalahan latar belakang diatas, maka penelitian perlu menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti melakukan penelitian dengan latar belakang alamiah atau sesuai dengan konteks yang ada. Penulisan kualitatif adalah lebih menekankan analisis pada pengumpulan data deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan anatara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Hal ini bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengkajian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan agrumentative. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Penelitian ini dilakukan, yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan dokumen, dan lain-lain, atau atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk pendeskripsian secara analisis



suatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Guru PPKn Dalam Memanfaatkan Internet Sebagai Sumber Belajar Untuk Menguatkan Civic Literacy Peserta Didik Agar Terhindar Dari Informasi Hoax

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan mengembangkan potensi warganegara agar menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab dan pada akhirnya menjadi warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizenship). Secara umum, PPKn memiliki fungsi pokok untuk mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab warga negara, dan mendorong partisipasi warga negara (Winarno, 2013: 19).

Untuk mewujudkan fokus dari pendidikan kewarganegaraan tersebut, salah satunya diperlukan penguatan kemelekwacanaan warga negara (civic literacy) untuk meningkatkan pengetahuan politik warganegara sebagai dasar partisipasi politik. Salah satunya yaitu melalui proses pembelajaran di kelas dengan mengintegrasikan materi yang mendukung penguatan civic literacy. Dwipayana (2013: 3) menjelaskan bahwa civic literacy dimaknai sebagai kapasitas pengetahuan dan kemampuan warga negara untuk memahami dunia politik mereka, atau secara lebih luas diartikan sebagai kapasitas pengetahuan tentang bagaimana untuk secara aktif berpartisipasi dan memulai perubahan dalam komunitas dan masyarakat yang lebih besar.

Setiap proses pembelajaran memiliki startegi-strategi tertentu dalam pelakasanaannya. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaiian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yakni tujuan pembelajaran (Majid. 2013:7). Strategi pembelajaran sendiri terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Penelitian ini berfokus pada startegi



pembelajaran guru PPKn dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar untuk menguatkan civic literacy peserta didik agar terhindar dari informasi hoax.

Pertama, tahap perencanaan yaitu tahap perumusan dan penyusunan Modul ajar. Modul ajar merupakan suatu bentuk perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran yang di dalamnya dapat diintegrasikan penguatan civic literacy kepada peserta didik agar terhindar dari informasi hoax. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa guru PPKn telah menyusun dan merancang Modul ajar sesuai dengan kaidah penyusunan Modul ajar yang ada. Guru juga mengembangkan pembelajaran yang memuat materi penguatan civic literacy. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa Modul ajar yang dibuat guru tersebut mengintegrasikan penguatan civic literacy. Salah satu indikator pembelajaran mengenai penguatan civic literacy dirumuskan guru sebagai berikut: “ Menganalisis pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam sistem pemerintahan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, tahap pelaksanaan yaitu tahap dimana guru mengimplementasikan Modul ajar yang telah dirancang dan disusun, meliputi tahap pendahuluan, inti dan penutup. Berdasarkan hasil wawancara, observasi kegiatan pembelajaran di kelas dan studi dokumen diketahui bahwa guru PPKn ketika proses pembelajaran berlangsung mengimplementasikan dan menyisipkan penguatan civic literacy. Pengembangan indikator dan tujuan pembelajaran yang dirumuskan sudah memasukkan materi penguatan civic literacy. Selanjutnya pemilihan sumber, model dan metode pembelajaran yaitu memanfaatkan internet sebagai sumber belajar, model pembelajaran menggunakan Discovery Learning dan Problem Based Learning (PBL) dengan metode tanya jawab dan diskusi yang menekankan kepada keaktifan peserta didik untuk berfikir kritis terhadap isu-isu politik, karena menggunakan model Problem Based Learning didasarkan pada permasalahan yang ada dengan metode diskusi kelompok. Hal tersebut menunjukkan penguatan civic literacy peserta didik dalam sumber, model dan metode yang dipilih oleh guru PPKn.

Hasil observasi dan wawancara dengan peserta didik mengenai pembelajaran PPKn di dalam kelas diketahui bahwa guru PPKn mulai dari kegiatan pendahuluan, inti hingga penutup menerapkan pembelajaran yang menguatkan civic literacy peserta didik. Mulai dari awal pembelajaran, guru menyiapkan peserta didik agar siap menerima materi seperti



menanyakan kehadiran peserta didik. Kemudian guru PPKn juga melakukan apersepsi mengenai materi yang akan dipelajari yaitu terkait informasi yang sedang berkembang. Ketika kegiatan inti, guru PPKn menjelaskan materi yang akan dipelajari, guru PPKn mengarahkan peserta didik untuk aktif mengeluarkan pendapat dalam proses pembelajaran. Kemudian guru PPKn juga menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Di sini guru PPKn mengarahkan peserta didik untuk aktif dan berfikir kritis terhadap isu-isu politik yang berkembang agar terhindar dari informasi hoax dan guru juga meluruskan apabila terdapat pemahaman yang keliru.

Tahap terakhir sebelum proses pembelajaran berakhir, guru bersama- sama dengan peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Guru PPKn terkadang menanyakan secara acak kepada peserta didik mengenai materi pembelajaran yang telah dipelajari, jika terdapat pendapat yang berbeda atau keliru, guru akan menghargai dan meluruskan pendapat tersebut. Penguatan kemelekwacanan waragnegara atau civic literacy pada mata pelajaran PPKn dilakukan melalui belajar bermakna. Belajar bermakna menurut Ausubel (1996) dalam Isjoni (2011: 35) yaitu materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru sebaiknya memiliki makna bagi siswa supaya bisa diaplikasikan di kehidupannya. Pembelajaran bermakna terjadi jika informasi baru beradaptasi dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Jadi belajar disini tidak hanya menghafal tetapi peserta didik dapat menangkap setiap makna dalam proses pembelajaran. Belajar bermakna lebih mengembangkan peserta didik agar memiliki pengetahuan yang lebih luas termasuk untuk penguatan civic literacy dengan mendiskusikan isu-isu politik. Penjelasan-penjelasan diatas sejalan dengan apa yang dilakukan guru PPKn di SMA Negeri 8 Seluma yaitu telah menyisipkan dan mengimplemetasikan pembelajaran yang menguatkan civic literacy peserta didik agar terhindar dari informasi hoax, mulai dari tahap pendahuluan, inti hingga penutup yaitu dengan mengarahkan peserta didik untuk berfikir kritis terhadap isu-isu politik dalam proses pembelajaran. Kemudian pemilihan sumber, model dan metode belajar yang diterapkan dalam proses pembelajaran juga menguatkan civic literacy peserta didik.

Ketiga, tahap evaluasi merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi sikap sosial, kompetensi sikap spiritual, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Guru PPKn dalam Modul ajar yang dirancang dan disusun diketahui bahwa sudah memasukkan



penilaian sikap responsif dan proaktif, penilaian pengetahuan dengan soal tertulis dan penilaian keterampilan dengan observasi.

Dampak Dari Strategi Guru PPKn Dalam Memanfaatkan Internet Sebagai Sumber Belajar Untuk Memperkuat Civic Literacy Peserta Didik Agar Terhindar Dari Informasi Hoax

Dwipayana (2013: 3) menjelaskan bahwa civic literacy dimaknai sebagai kapasitas pengetahuan dan kemampuan warga negara untuk memahami dunia politik mereka, atau secara lebih luas diartikan sebagai kapasitas pengetahuan tentang bagaimana untuk secara aktif berpartisipasi dan memulai perubahan dalam komunitas dan masyarakat yang lebih besar.

Penguatan civic literacy dapat dilakukan melalui proses pembelajaran di kelas, seperti yang sudah diuraikan bahwa guru PPKn memiliki strategi dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar untuk memperkuat civic literacy peserta didik agar terhindar dari informasi hoax. Strategi pembelajaran yang diterapkan guru PPKn sendiri terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Dampak dari strategi guru PPKn dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar untuk memperkuat civic literacy peserta didik agar terhindar dari informasi hoax, dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa strategi guru PPKn di SMA Negeri 8 Seluma dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar untuk memperkuat civic literacy peserta didik agar terhindar dari informasi hoax memberikan beberapa dampak, diantaranya yaitu: 1) Civic literacy peserta didik meningkat karena dapat menghindari informasi hoax dari internet melalui crosscheck setiap informasi; 2) Civic literacy peserta didik meningkat melalui diskusi kelompok dan 3) Peserta didik ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik di sekolah salah satunya yaitu pemilihan ketua OSIS.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi. Dari hasil observasi yaitu dari proses pembelajaran di kelas yang terdiri dari tahap pendahuluan, inti dan penutup. Pada tahap pendahuluan, yaitu ketika guru mempersiapkan kondisi peserta didik dan melakukan apersepsi dengan isu-isu politik yang berkembang, peserta didik memiliki antusias yang baik.



Ketika kegiatan inti, yaitu guru PPKn menjelaskan materi yang akan dipelajari, peserta didik aktif mengeluarkan pendapat dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Ketika diskusi peserta didik aktif mengeluarkan pendapatnya dan berfikir kritis terhadap isu-isu politik yang berkembang agar terhindar dari informasi hoax dan apabila terdapat pemahaman yang keliru guru akan meluruskan. Terakhir tahap penutup, yaitu guru PPKn dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Selain itu, guru juga mengajukan pertanyaan secara acak kepada peserta didik dan peserta didik mampu menjawabnya.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil wawancara, observasi selama kegiatan pembelajaran, berupa Modul ajar peserta didik menunjukkan bahwa terdapat peningkatan civic literacy peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat ketika diskusi kelompok mengenai isu-isu politik yang sedang berkembang peserta didik dapat aktif mengeluarkan pendapat dan berfikir kritis sehingga diperoleh informasi yang benar dan terhindar dari informasi hoax. Selain itu, peserta didik juga aktif mengikuti kegiatan sekolah yang melibatkan partisipasi peserta didik, seperti pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS.

Faktor Pendukung dan Penghambat Dari Strategi Guru PPKn Dalam Memanfaatkan Internet Sebagai Sumber Belajar Untuk Menguatkan Civic Literacy Peserta Didik Agar Terhindar Dari Informasi Hoax

Terdapat beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat dari strategi guru PPKn dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar untuk menguatkan civic literacy peserta didik agar terhindar dari informasi hoax yang terjadi di SMA Negeri 8 Seluma.

Terkait faktor pendukung, diantaranya yaitu:

- a. Berasal dari sarana dan prasarana sekolah, yaitu sekolah mendukung penguatan civic literacy peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menyediakan akses internet berupa wifi.
- b. Berasal dari guru PPKn, yaitu guru PPKn memiliki keinginan untuk menguatkan civic literacy peserta didik dengan memanfaatkan informasi di internet disertai pengawasan dan pengarahan agar peserta didik memperoleh informasi yang benar.

Selain itu juga terdapat faktor pendukung lain yang berasal dari guru PPKn yaitu:



- 1) Proses pelaksanaan pembelajaran, yaitu guru PPKn melakukan pemilihan sumber belajar, model dan metode pembelajaran dalam RPP yang memungkinkan guru dapat menciptakan kondisi menguatkan civic literacy peserta didik pada saat proses pembelajaran.
- 2) Evaluasi pembelajaran, yaitu guru PPKn memasukkan penilaian sikap responsif dan proaktif terhadap informasi yang berkembang didalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang dirancang.

Faktor pendukung strategi guru dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar untuk menguatkan civic literacy peserta didik agar terhindar dari informasi hoax dilakukan dengan memanfaatkan informasi dari internet berupa isu-isu politik untuk bahan diskusi agar peserta didik aktif dan mampu berfikir kritis serta terhindar dari informasi hoax. Penguatan civic literacy peserta didik dilakukan dengan mengarahkan anak untuk aktif membina pengetahuannya sendiri. Menurut Briner dalam Isjoni (2011: 31) pembelajaran konstruktivisme mengarahkan siswa membina pengetahuan dengan menguji ide dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada, kemudian mengimplementasikannya pada satu situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual yang akan diwujudkan. Metode cooperative learning biasanya menggunakan pendekatan konstruktivisme karena menimbulkan keyakinan kepada diri sendiri dan berani menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi pembelajaran yang baru, karena pelajar yang belajar secara konstruktivisme diberi peluang untuk membina sendiri kefahaman mereka (Isjoni, 2011: 33). Teori belajar yang sesuai dengan cooperative learning pada strategi guru PPKn dalam menguatkan civic literacy peserta didik yaitu teori belajar bermakna. Menurut Ausubel dalam Isjoni (2011: 35) yang menjelaskan bahwa materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru sebaiknya memiliki makna bagi siswa supaya bisa diaplikasikan di kehidupannya. Pembelajaran bermakna terjadi jika informasi baru beradaptasi dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Jadi belajar disini tidak hanya menghafal tetapi peserta didik dapat menangkap setiap makna dalam proses pembelajaran.

Teori belajar bermakna lebih mengembangkan peserta didik agar memiliki pengetahuan yang lebih luas. Belajar bermakna lebih memudahkan guru untuk menguatkan civic literacy peserta didik di SMA Negeri 8 Seluma seperti telah diuraikan sebelumnya yaitu menggunakan model Discovery Learning dan Problem Based Learning (PBL).



Sedangkan faktor penghambat strategi guru PPKn dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar untuk menguatkan civic literacy peserta didik agar terhindar dari informasi hoax, diantaranya yaitu:

- a. Berasal dari sarana dan prasarana sekolah, yaitu lemahnya sinyal wifi sekolah karena banyaknya pengguna. Sehingga kurang mendukung pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran
- b. Berasal dari guru PPKn, yaitu:
 - 1) Perencanaan pembelajaran, yaitu guru PPKn kesulitan untuk mengintegrasikan Modul ajar yang berperspektif penguatan civic literacy.
 - 2) Proses pelaksanaan pembelajaran, yaitu guru PPKn kesulitan mengintegrasikan penguatan civic literacy dalam setiap kompetensi dasar.
- c. Berasal dari Peserta didik, yaitu peserta didik yang masih kesulitan untuk mengeluarkan pendapatnya dan membedakan informasi yang benar dan hoax terkait isu-isu politik yang sedang berkembang karena tingkat kemampuan peserta didik yang berbeda-beda.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian Strategi guru PPKn dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar untuk menguatkan civic literacy peserta didik agar terhindar dari informasi hoax di SMA Negeri 8 SELUMA , yaitu:

- a. Merancang Modul ajar yang mengintegrasikan penguatan civic literacy ke dalam materi pembelajaran PPKn yaitu guru PPKn mengembangkan materi pembelajaran mengenai penguatan civic literacy yang dimuat dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran.
- b. Mengimplementasikan Modul ajar yang dirancang dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ketika di dalam kelas guru seringkali mengembangkan sendiri proses pembelajaran,
- c. Melakukan penilaian dengan memasukkan penilaian sikap responsif dan proaktif, penilaian pengetahuan dengan soal tertulis dan penilaian keterampilan dengan observasi.

Dampak dari strategi guru PPKn dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar untuk menguatkan civic literacy peserta didik agar terhindar dari informasi hoax di SMA Negeri 8 Seluma.



Strategi guru PPKn dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar untuk menguatkan civic literacy peserta didik agar terhindar dari informasi hoax memberikan dampak dan perubahan terhadap peserta didik. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya civic literacy peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat ketika diskusi kelompok mengenai isu-isu politik yang sedang berkembang peserta didik aktif mengeluarkan pendapat dan berfikir kritis, sehingga diperoleh informasi yang benar dan terhindar dari informasi hoax. Selain itu, peserta didik juga aktif mengikuti kegiatan sekolah yang melibatkan partisipasi peserta didik, seperti pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS.

Faktor pendukung dan penghambat dari Strategi guru PPKn dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar untuk menguatkan civic literacy peserta didik agar terhindar dari informasi hoax di SMA Negeri 8 Seluma

a. Faktor pendukung

Berasal dari sarana dan prasarana sekolah, yaitu sekolah mendukung penguatan civic literacy peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menyediakan akses internet berupa wifi. Berasal dari guru PPKn, yaitu guru PPKn memiliki keinginan untuk menguatkan civic literacy peserta didik dengan memanfaatkan informasi di internet disertai pengawasan dan pengarahan agar peserta didik memperoleh informasi yang benar. Selain itu juga terdapat faktor pendukung lain yang berasal dari guru PPKn yaitu:

Proses pelaksanaan pembelajaran, yaitu guru PPKn melakukan pemilihan sumber belajar, model dan metode pembelajaran dalam RPP yang memungkinkan guru dapat menciptakan kondisi menguatkan civic literacy peserta didik pada saat proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran, yaitu guru PPKn memasukkan penilaian sikap responsif dan proaktif terhadap informasi yang berkembang didalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang dirancang.

b. Faktor penghambat

Berasal dari peserta didik, yaitu keingintahuan peserta didik yang kuat untuk mengetahui informasi baru dan guru harus mengawasi dan mengarahkan agar peserta didik memperoleh informasi yang benar



5. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2018). *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aziz, A., & Wahab, S. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- BNPT. (2017, Agustus 30). Ini Ciri-Ciri Hoax Menurut Ketua Dewan Pers. Diambil kembali dari <https://www.bnpt.go.id/ini-ciri-ciri-hoax-menurut-ketua-dewan-pers.html>
- Dwipayana, A. (2013, Maret). *Civic Literacy*. Naskah Combine. Fisipol UGM.
- Effendy, O. (2007). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ferdian, A., & Chazawi, A. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Isjoni. (2011). *Cooperative Learning*. Bandung: Alfabeta.
- J, S. (2006). *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT Grasindo.
- Juditha, C. (2018, April). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1 h. 38.
- Madiong, B., Mustapa, Z., & Ratu Chakti, A. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*. Makasar: Celebes Media Perkasa.
- Majid, A. (2013). *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mastur. (2017). Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Di Smp. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan Volume 4, No 1, April 2017*, 50-64.
- Milner, H. (2002). *Civic Literacy: How Informed Citizens Make Democracy Work*. Tufts University: University Press of New England.
- Murdiono, M. (2012). *Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak.
- Oliver, S. (2007). *Strategi Public Relations*. Jakarta: Erlangga.
- Pianda, D. (2018). *Kinerja Guru: Kompetensi Guru, Motivasi Kerja, Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Sukabumi: CV Jejak.



- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (JMDK), Vol. 5 No 1, 62.
- Rahmah, J., & Latifah.H., (2016),. Strategi Belajar Mengajar,. Yogyakarta: Deepublish
- Ramadhan, A. (2007). Seri Pelajaran Komputer: Internet dan Aplikasinya. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rusdiana, & Heryati, Y. (2015). Pendidikan Profesi Keguruan. Bandung: Pustaka Setia.
- Sanjaya, W. (2008). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.
- Soeharto, K. (2003). Tehnologi Pembelajaran (Pendekatan Sistem, Konsepsidan Model, SAP, Evaluasi, Sumber Belajar Media). Surabaya: Surabaya Intellectual Club.
- Somantri, N. (2006). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Algesindo. Sugiarto, E. (2015). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R& D. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, K. (2010). Inovasi Nilai Dan Fungsi Komunikasi Partai Politik Bagi Penguatan Civic Literacy. Bandung.
- Sutopo, H. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
- Suwarna, Slamet, M., & dkk. (2006). Pengajaran Mikro: Pendekatan Praktis Dalam Menyiapkan Pendidik Profesional. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Syafrizal, M. (2005). Pengantar Jaringan Komputer. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ubaedillah, A. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi. Jakarta: Kencana.
- Wahab, & Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.
- Warsita, B. (2008). Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta.